

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan analisis yang dilakukan serta teori yang diperoleh penulis dari berbagai bukti pendukung maka penulis menarik suatu simpulan mengenai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran operasional Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. KPwBI Provinsi Jawa Timur menggunakan dana dari pemerintah yang berupa asumsi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah dibuat masing-masing unit kerja dalam satuan kerja.
2. Perencanaan anggaran dilakukan berdasarkan prosedur yang telah tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 17/92/INTERN.
3. Dalam hal pelaksanaan anggaran di KPwBI Provinsi Jawa Timur sudah sangat baik, namun terkadang keterlambatan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan dapat menghambat program kerja di bulan berikutnya. Maka dari itu, diperlukan pemantauan dalam pelaksanaan anggaran yang berupa EKB (Evaluasi Kinerja Bulanan). Ketika dana anggaran yang direncanakan kurang dapat mengajukan realokasi anggaran sesuai dengan ketentuan.
4. Pertanggungjawaban di KPwBI Provinsi Jawa Timur diwujudkan dalam bentuk RPPB (Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan) dan juga dapat sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) Manajemen Keuangan.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia

(KPwBI) Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 17/92/INTERN. Akan tetapi, dalam hal penyerapan anggaran terjadi selisih yang cukup besar antara realisasi dengan anggarannya. Untuk itu, anggaran dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu alat pengendalian organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*) atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*).

- a. Bagi para bagian Unit Kerja yang menyusun anggaran, sebaiknya:
  1. Dalam perencanaan anggaran harus dipikirkan matang-matang dalam menentukan nilai nominal yang tepat agar realisasinya sesuai dengan target karena sesuai dengan fungsi anggaran sebagai penilaian kinerja yaitu suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
  2. Keakuratan estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan anggaran, seperti perencanaan anggaran pengeluaran yang lebih banyak dalam menentukan nilai nominal seharusnya nilai nominal tersebut lebih disesuaikan dengan kebutuhan,
- b. Bagi para Manajer dalam memantau pelaksanaan anggaran sudah sangat baik, karena dilihat dari karakteristik anggaran harus berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Suatu pertanggungjawaban seorang manajer dalam memantau dan mengambil keputusan agar anggaran dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga dalam klasifikasi berdasarkan kehematan, anggaran disusun berdasarkan skala ekonomisnya. Prioritas belanja disusun berdasarkan tingkat kebutuhan sesuai dengan kebijakan nasional mengingat terbatasnya pendapatan negara.

Atas hal tersebut diharapkan KPwBI Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perencanaan anggaran di tahun yang akan datang lebih matang,

tepat sasaran, efektif dan efisien sehingga dapat terjadi penyerapan anggaran yang lebih maksimal.